

PENGALAMAN EMPIRIS MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN DI JAWA TIMUR¹

Oleh : Ir. Apriyanto MM²

I. PENDAHULUAN

Sejak dikobarkannya api reformasi, restrukturisasi kelembagaan pemerintah ikut terkena imbasnya. Dampak yang paling nyata dari otonomi daerah adalah terjadinya likuidasi instansi vertical yang ada di wilayah menjadi instansi lain yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Salah satu instansi vertical yang ikut terlukuidasi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur. Instansi ini sampai dengan bulan September 2000 sudah demisioner. Kemudian sejak bulan Desember 2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menetapkan dibentuknya Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 43 Tahun 2000 tentang Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur. Sumberdaya instansi ini adalah gabungan dari ex Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur dan Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Timur.

Sampai saat ini Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur baru berjalan sembilan bulan. Dalam waktu relatif muda tersebut ada beberapa kegiatan penting yang telah dipersiapkan untuk menyongsong masa depan seperti Penyusunan Master Plan 2001 – 2004 dan Penyusunan Rencana Strategik Tahun 2001 – 2005. Kedua buku tersebut menjadi acuan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur karena substansi yang ada merupakan wujud operasional dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda No. 43 Tahun 2000.

¹ Disampaikan pada acara Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi, 2-3 Oktober 2001, Ruang Serbaguna I, Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong.

² Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur

Disamping kegiatan besar yang telah dilakukan, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur juga mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain, seperti kajian-kajian baik yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi maupun yang dilaksanakan sendiri. Untuk menopang kegiatan-kegiatan tersebut Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur mendapatkan sumber dana dari APBD I maupun APBN.

Kegiatan yang cukup menonjol yang telah disampaikan di forum regional maupun nasional adalah Program Pembelian Gabah Petani. Program ini sepenuhnya mendapat dukungan dari dana APBD I TA. 2001 sebesar 31 milyar rupiah. Arah dari program ini adalah untuk menstabilkan harga dasar gabah di tingkat petani sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak.

Kegiatan pembelian gabah ini selain merupakan Program propinsi Jawa Timur juga diikuti oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur dengan model pendekatan program yang sama. Dengan demikian untuk mewujudkan pendapatan yang lebih baik di tingkat petani, dukungan Kabupaten/Kota di Jawa Timur cukup besar walaupun dana yang dialokasikan masing-masing Kabupaten/Kota bervariasi.

Disadari bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga masih jauh dari jangkauan, maka Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur terus melakukan berbagai upaya pendekatan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang pada tahap awal akan memantapkan kelembagaan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur serta membangun sistem kerja sama antar instansi Pemerintah, swasta serta masyarakat. Membangun system kerja sama tersebut antara lain diwujudkan dengan berbagai cara yaitu melalui rapat-rapat koordinasi, mengadakan pendekatan ke obyek sasaran dan lain-lain. Cara ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberikan dukungan sepenuhnya sejak dari awal berdirinya Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini.

Dalam perjalanannya Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur yang didukung oleh Kepala Badan, Wakil Kepala, empat bidang teknis, satu sekretariat dan kelompok jabatan fungsional masih ada kegiatan-kegiatan yang belum tertangani. Walaupun demikian munculnya Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur mendapat sambutan baik Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diikuti dengan terbentuknya instansi ketahanan pangan di Kabupaten/Kota yang sampai saat ini telah berjumlah 31 instansi dengan bentuk yang berbeda-beda, ada yang berbentuk Dinas, Kantor, Sub Dinas, Seksi, dan UPTD. Kondisi ini dampak dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan BKP Propinsi Jawa Timur serta berbagai pendekatan yang terarah untuk membangun Lembaga Ketahanan Pangan di Daerah kabupaten /kota.

II. SUSUNAN ORGANISASI, VISI DAN MISI

2.1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Perda No. 43 Tahun 2000 terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Penyusunan Program;
- e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- f. Bidang Pengendalian Pangan;
- g. Bidang Penganekaragaman Pangan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Bidang Penyusunan Program terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- b. Sub Bidang Perumusan Program;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kebutuhan dan Pengadaan Pangan;
- b. Sub Bidang Distribusi Pangan;
- c. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pangan.

Bidang Pengendalian Pangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- b. Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi;
- c. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi.

Bidang Penganekaragaman Pangan, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Pengembangan Penganekaragaman Pangan;
- c. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal.

2.2. Visi

“Terwujudnya institusi yang handal, proaktif, aspiratif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya wilayah secara efisien dan berkelanjutan dalam kerangka pertanian yang modern, tangguh, dan efisien menuju masyarakat yang sejahtera”.

2.3. Misi

- a. Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, lokal daerah dan wilayah propinsi sesuai dengan sumber daya dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan kualitas pangan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta perumusan kebijakan pangan yang menyangkut aspek ketersediaan, distribusi, harga pangan strategis, pengendalian dan penganekaragaman pangan propinsi dan lintas kabupaten/kota.
- c. Menciptakan hubungan dan koordinasi yang harmonis dengan lembaga terkait, baik didalam maupun diluar Departemen Pertanian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.
- d. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal, melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan terdesentralisasi.
- e. Mengembangkan agribisnis pangan global dengan membangun keunggulan kompetitif dan komparatif produksi serta sumberdaya wilayah.

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut :

- a. Membangun sistem ketahanan pangan wilayah yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi secara sinergis.

- b. Mengembangkan kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional.
- c. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah.
- e. Meningkatkan penganekaragaman pangan dan produk-produk pangan olahan sesuai potensi sumberdaya lokal, sehingga mendorong penurunan konsumsi beras perkapita.
- f. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- g. Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat agar dapat mengenali dan mengantisipasi secara dini masalah kerawanan pangan di wilayahnya.

3.2. Sasaran

- a. Terwujudnya organisasi Badan Ketahanan Pangan yang mantap.
- b. Terbangunnya system kerjasama yang mantap antar instansi pemerintah, swasta serta masyarakat dengan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur.
- c. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan pangan di wilayah-wilayah yang mampu bersaing di pasaran.
- d. Meningkatnya warga masyarakat yang mengerti dan tanggap terhadap pangan yang berkualitas.
- e. Harga pangan dapat dikendalikan, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan sekaligus memberikan keuntungan pada produsen/petani.

- f. Konsumsi masyarakat akan beras dapat diturunkan secara berangsur-angsur sampai pada batas minimal yang dapat dilakukan.
- g. Tingkat kerawanan pangan di daerah-daerah dapat diturunkan setiap tahunnya.
- h. Pangan dapat tersedia secara cukup untuk dikonsumsi di masing-masing wilayah.

3.3. Program

Untuk mendukung kebijakan pembangunan ketahanan pangan, dirumuskan 2 Program utama yang menjadi acuan dalam operasional yaitu :

§ Program Agribisnis

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan usaha di sektor pertanian, mulai dari sub system sarana dan prasarana, sub system produksi, sub system pengolahan dan pasca panen serta sub system pemasaran. Dengan demikian manfaatnya terhadap peningkatan pendapatan petani semakin jelas.

§ Program Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan mulai dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian diharapkan nantinya akan dicapai kecukupan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga dengan mutu, aman serta terjangkau.

3.4. Kegiatan

Kegiatan Pokok Badan Ketahanan Pangan

1. Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan

Kegiatan Pokok Pemantapan Koordinasi Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Ketahanan Pangan :

- a. Peningkatan koordinasi perumusan alternatif kebijakan ketahanan pangan makro.
- b. Peningkatan koordinasi kemampuan kelembagaan ketahanan pangan.
- c. Pemantapan koordinasi perencanaan dan evaluasi.
- d. Peningkatan koordinasi kebijaksanaan distribusi dan harga pangan strategis.
- e. Peningkatan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan.
- f. Peningkatan koordinasi analisis dan perencanaan kebutuhan konsumsi pangan.
- g. Peningkatan koordinasi antar kawasan dalam pengembangan pangan.
- h. Pemantapan penyediaan dan analisis data.
- i. Peningkatan koordinasi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian pangan strategis dan alternatif.
- j. Peningkatan keterpaduan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- k. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam ketahanan pangan.
- l. Introduksi dan pengembangan sistem tunda jual untuk mengatasi distribusi pangan.
- m. Sosialisasi dan pengembangan teknologi pengolahan pangan yang sesuai kondisi setempat.
- n. Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan.
- o. Peningkatan partisipasi dan motivasi masyarakat dalam peningkatan mutu, gizi dan keamanan pangan.
- p. Motivasi pengembangan industri pengolahan pangan, baik skala kecil maupun menengah.

- q. Pengembangan sistem dan metoda pemberian penghargaan (reward) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
- r. Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan.
- s. Pengembangan promosi produk pangan lokal dan pangan olahan.

IV. HASIL-HASIL YANG TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN

- a. Perencanaan Teknis
 - ▣ Penyusunan Master Plan 2001 – 2004
 - ▣ Penyusunan renstra 2001 – 2005
 - ▣ Penyusunan Program dan Proyek APBD dan APBN
- b. Kajian-kajian
- c. Program Pembelian Gabah Petani di 22 Kabupaten
- d. Promosi
- e. Promosi Produk Pangan Olahan Dilakukan di dalam maupun di luar Propinsi
- f. Pameran
- g. Pameran Produk Pangan Olahan di dalam maupun di luar Propinsi
- h. Lomba-lomba
- i. Lomba Cipta Menu
- j. Lomba Cipta Makanan Tradisional
- k. Gelar Teknologi
- l. Gelar Teknologi Makanan Tradisional
- m. Fasilitasi
- n. Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah di Bidang Permodalan, Manajemen dan pemasaran
- o. P e t a
- p. Pembuatan Peta-peta Daerah Rawan Pangan, Ketersediaan dll.
- q. Koordinasi dan Sosialisasi Program Ketahanan Pangan
- r. Pelatihan-pelatihan